

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2000, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Cetakan 1, Mandar Maju Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus, 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra aditya Bakti, Bandung
- _____, 1979, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Liberty, Jakarta
- Bahsan, M. 2007, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Divisi Pengelola Kebijakan Kredit, 2000, *Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah*, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Kantor Pusat Jakarta
- _____, 2006, *Petunjuk Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah*, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Kantor Pusat Jakarta
- _____, 2006, *Petunjuk Pelaksanaan Rekstruk-turisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan*, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Kantor Pusat, Jakarta
- Divisi Sumber Daya Manusia, 2008, *Pelatihan Lelang Hak Tanggungan*, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Kantor Pusat, Jakarta
- Hadisoepipto, Hartono, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Jogjakarta
- HS. Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Iskandar, Radhiani, 2005, *Peranan Notaris dalam Pembuatan SKMHT*, FH UNAIR, Surabaya
- Parlindungan, AP, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Rahman, Hasanuddin, 1993, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Satrio, J., 1992, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti,, Bandung.

_____, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Hak Tanggungan, Buku 2 cetak 1, Citra Aditya Bakti, Bandung

Syahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta

Harsono, Sony, 1999, *Implikasi Undang-Undang Hak tanggungan Terhadap Bisnis*, Properti Indonesia, Jakarta

Suyatno, Thomas, 1993, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Turatmiyah, Sri, 2004, *Laporan Penelitian: Pembuatan SKMHT/APHT*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang

Widiarto, Sigit, 2006, *Kumpulan Undang-undang Bidang Perbankan*, Universitas Atmajaya, Jogjakarta

Santoso Lowang.com/date/hak tanggungan / UU. 4. 1994. pdf

[http://Jakarta.go.id/into layanan/hak tanggungan.asp](http://Jakarta.go.id/into_layanan/hak_tanggungan.asp)

<http://adln.lib.unair.ac.id>

[www.kompas.com/date/hak tanggungan.htm](http://www.kompas.com/date/hak_tanggungan.htm)

[www.aneka karya. Indonetwork. co.id/783949/SKMHT.htm](http://www.aneka_karya.Indonetwork.co.id/783949/SKMHT.htm)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *Staatsblad* 1908 nomor 542 yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937 nomor 190.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 2043), Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau Disebut Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469)

Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata cara penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652).

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit, Kredit Tertentu.

C. Makalah

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Permasalahan dan Hambatan*, diselenggarakan oleh FH UGM, Yogyakarta, 16 – 23 Juli 1996.

Sutjipto, 1997, *Pola Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, 25 Agustus 1997 Bandung.